Hukum Tata Negara
Ashabul Qahfih
10200120251

A. Pengertian Hukum Tata Negara

1. Istilah

Istilah hukum tata Negara yaitu serangkaian kaedah hukum yang mengatur susunan alat-alat kelengkapan Negara, hubungan kekuasaan satu sama lain dan fungsi mendasar.

Istilah atau penyebutan hukum tata Negara dari setiap Negara itu berbeda-beda.

Antara lain sebagai berikut:

- Belanda ;Staatsrecht
- Inggris ;Constitutional Law
- Jerman ;Verfassungsrecht
- Perancis ;Droit Constitutionnel

2. Pengertian Hukum Tata Negara

Pengertian Hukum Tata Negara menurut saya adalah Kumpulan Hukum yang mengatur hubungan, tata organisasi Negara, dan tugas fungsi wewenang dari organisasi Negara.

Menurut para ahli:

-Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangan masing-masing hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga Negara dalam kegiatannya.

-J.H.A Logeman

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi Negara.

-Paul Scholten

Hukum tata Negara adalah het recht dat regelt de staatsorganisatie, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara .

3. Ruang Lingkup Kajian

- Lembaga Negara
- Kewenangan Lembaga Negara
- Bentuk dan system pemerintahan
- Batasan dan pemisahan Cabang kekuasaan
- Konstitusi
- Prinsip dan Hubungan antar lembaga Negara
- Hak asasi manusia

4. Hubungan dengan ilmu lainnya

-Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara

-**Hubungan**-Hukum tata Negara dan ilmu Negara merupakan objek kajian yang sama. Tetapi Hukum tata Negara terkait Negara dibatasi atau terikat oleh tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Misalnya Hukum Tata Negara Indonesia, Droit Constitutionnel Perancis (Hukum tata Negara Perancis). Sementara kajian ilmu Negara bersifat universal atau menyeluruh. Ilmu Negara merupakan dasar ilmu untuk mempelajari hukum tata Negara.

-**Hukum administrasi Negara**-Hukum yang mengatur dan mengikat aparatur Negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Negara/pemerintahan.

-**Hubungan**-Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara sama-sama menjadikan Negara sebagai objek kajian.

- Hukum tata Negara menentukan lembaga Negara dan wewenangnya baik vertikal maupun horizontal
- Hukum administrasi Negara mengatur penggunaan wewenang lembaga Negara yang telah diberikan oleh hukum tata Negara

-Ilmu Politik-Ilmu social yang mempelajari atau membahas politik praktis serta teori dan deskripsi serta perilaku politik dan analisis sistem politik

-Hubungan Hukum tata Negara dan ilmu politik sama-sama menjadikan Negara sebagai objek penyelidikan.

B. Sumber-sumber Hukum Tata Negara

Pengertian Sumber Hukum

Jimly Asshiddiqie; Sumber Hukum adalah menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Ahmad Ali; Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, dan pada kalanya sumber hukum sekaligus merupakan hukum juga, contohnya putusan hakim.

Sudikno Mertokusumo, sumber hukum dibagi menjadi dua sumber, yaitu

- Sumber hukum formal adalah merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.
- Sumber Hukum Materil adalah tempat dari mana materil itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum

Khusus dibidang Hukum Tata Negara diakui secara umum adalah:

1. Undang-undang Dasar dan Peraturan perundang-undangan tertulis
2. Yurisprudensi –putusan peradilan
3. Konvensi ketatanegaraan-kebiasaan
4. Hukum internasional-traktat/perjanjian antar Negara
5. Doktrin ilmu Hukum tata Negara- pendapat ilmun yang kredibel

C. Asas Hukum tata Negara

1. Asas Pancasila

Merupakan prinsip dasar dan utamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara,Pancasila merupakan dasar Negara dan menjadi pedoman dari semua aturan yang berlaku dalam Negara Indonesia.

2.Asas Negara Hukum

Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum.Pernyataan ini di muat dalam UUD 1945.

Negara Hukum bermakna menjunjung tinggi hukum dengan melihak aspek keadilan dan kesejahteraan,tanpa melihat atau diintervensi oleh pebguasa

3.Asas Negara Kesatuan

Merpakan prinsip dasar bahwa Negara tersebetus merupakan satu kesatuan yang berdaulat Negara kesatuan adalah Negara yang menjadikan suatu pusat Negara menjadi posisi tertinggi dalam kekuasaan dan pemerintahan

4.Asas kedaulatan rakyat

Asas kedaulatan rakyat berarti perinsip Megara yang menunjukan bahwa kekuasaan pemerintah berada ditangan rakyat,untuk rakyat,dan berasal dari rakyat

5.Asas pembagian kekuasaan

Asas pembagian kekuasaan menunjukan bahwa Negara Indonesia memiliki perinsip membagi kekuasaan disetiap daerah.Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan yang semena-mena yang dilakukan oleh satu pemerintah atau kelompok.Maka dari itulah pembagian kekuasaan dilakukan pembgian kekuasaan untuk meminimalisir penguasa yang semena-mena.

D.Sejarah Ketata Negaraan Indonesia

Sejarah ketata negaraan dapat ditelusuri antara lain berdasarkan perubahan konstitusi,bentuk Negara,bentuk pemerintahan system pemerintah dan lainnya.

1.Bentuk Pemerintahan

2.Sistem Pemerintahan

3.Bnetuk Negara

4Konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu Negara.Sebagai hukum dasar,konstitusi dapat dibentuk hukum dasar yang tertulis dan dapat pula tidak tertulis.Indonesia menganut konstitusi tertulis yang disebut dengan UUD 1945.Sejarah ketata negaraan Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian.dimulai UUD 1945,konstitusi RIS UUD sementara,akhirnya kembali ke UUD 1945,lalu kemudian mengalami perubahan pada tahun 1999-2000 dan tahun 2002.

- UUD 1945(1945-1949)
- UUD RIS (1949-1950)
- UUD Sementara(1950-1959)
- UUD 1945(1959-Sekarang)

Sejarah ketata negaraan Indonesia,khususnya mengenai UUD telah bebrapa kali mengalami perubahan dalam arti pembentukan,penyusunan dan pergantian UUD.Sejarah mencatat telah terjadi beberapa kali pergantian dan penyusunan,dan pembentukan UUD dimulai pada tahun 1945 yang disusun oleh BPUPKI dan PPKI.Kemudian pada tahun 1949,yang disusun bersama antar dilegasi Indonesia bersama dengan Bijeenkomsii foor vederal overlag (BFO) yang menghasilkan konstitusi RID,lalu pada tahun 1950 dengan UUD tahun

1950, yang penyusunannya dilakukan oleh majelis konstituente. Namun kemudian upaya penyusunannya berhenti dengan dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD dan berlaku hingga saat ini.

Sejarah tahun 1959 hingga saat sekarang. UUD 1945 telah 4 kali mengalami perubahan dalam pembaharuan, yaitu pada tahun 1999, 2001, 2002, Jimly Asshiddiqie membadakan perubahan UUD dasar kedalam dua bentuk, pertama. perubahan dalam arti pembentukan penyusunan dan pergantian UUD. Contohnya perubahan dari UUD 1945 ke konstitusi RIS dan dari UUDS tahun 1950 ke UUD 1945 merupakan perubahan dalam arti pergantian UUD, kedua perubahan undang-undang dasar dalam arti pembaruan, perubahan pergantian undang-undang dasar dalam arti pembaruan baru terjadi setelah era reformasi. dimana pembaharuan undang-undang dasar pertama, kedua, ketiga, dan keempat disusun utuh dalam naskah yang sistematis.

E, Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara

Terdapat beberapa istilah yang memiliki arti yang sama dengan konstitusi, seperti *Constitutie* dan *Grondwet* (Belanda), *Constitution* (Prancis), *Constitutio* (Latin-Inggris), *Fundamental Laws* (Amerika –Serikat), dan di Indonesia digunakan istilah undang-undang Dasar yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Grondwet*.

Pengertian Konstitusi

-C.F Strong

Kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (Rakyat). dan hubungan diantara keduanya, baik bentuknya terdokumentasi maupun tidak terdokumentasi

-Jimly Asshiddiqie

Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.

3 Nilai Konstitusi

- Nilai yang bersifat Normatif; Apabila konstitusi diterima, diakui, dan patuh sebagaimana mestinya (sollen), baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat (Subjek Hukum)
- Nilai yang bersifat Nominal; Apabila Konstitusi tidak dijadikan sebagai sumber hukum atau pedoman, baik sebagian atau seluruhnya dalam proses penyelenggaraan Negara.
- Nilai yang bersifat semantik; Apabila konstitusi hanya dijadikan sebagai alat pembenaran atas segala kebijakan/tindakan penguasa, tanpa dipraktikkan secara sungguh-sungguh.

Tujuan Konstitusi

- Konstitusi bertujuan untuk menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat atau menjadi pedoman penyelenggaraan Negara dan bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah.
- Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakannya

- Pedoman penyelenggaraan Negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi Negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

Fungsi Konstitusi

Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak bagi warga Negara terlindung dan tersalurkan konstitusionalisme.

Materi Muatan Konstitusi Secara Umum

- Pembentukan, pembagian, dan pemisahan kekuasaan
- Pemilihan Umum
- Hak dan Kewajiban Warga Negara, termasuk Hak asasi Manusia
- Kewenangan cabang-cabang kekuasaan (Legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga independent)

Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara

Fungsi kekuasaan

Negara Hukum yang dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat memiliki ciri-ciri, yang salah satunya menekankan adanya pembagian kekuasaan, sebagaimana yang dipelopori oleh Friedrich Julius Stathl, yaitu;

1. Pembagian kekuasaan
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Administrasi

Selanjutnya Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga fungsi, yaitu, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Pembagian kekuasaan sangat erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan. Istilah Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan Separation of power berdasarkan trias political atau tiga fungsi kekuasaan yang harus dibedakan dan dipisahkan secara terstruktur tanpa mencampurkan ketiganya. Sedangkan pengertian pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua, yang pertama bersifat fungsional yang artinya ditinjau dan dibedakan dari fungsinya masing-masing, Kedua bersifat kewilayahan dan kedaerahan. Artinya pembagian kekuasaan didasarkan dari daerah atau wilayah kekuasaan tersebut dengan melihat kebijakan dan otonomi yang berbeda berdasarkan wilayah atau daerah.

Kekuasaan Eksekutif

Eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan Negara.

Ada tiga jenis pemerintahan;

-Presidensial;

- Kedudukan kepala Negara tidak lepas dari jabatan kepala pemerintahan
- Kepala Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya
- Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen

- Kabinet atau menteri bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden

-Parlementer

- Sistem pemerintahannya dibagi mejnadi dua yaitu kepala pemerintah dan kepala Negara yang di isi atau diduduki oleh dua orang yang berbeda
- Kepala Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen

-Sistem Campuran

- Sistem pemerintahan Presindesial dan Parlementer berjalan secara bersamaan dalam system pemerintah yang diterapkan

Kekuasaan Legislatif

Legislatif memiliki tiga fungsi,yaitu;

-Fungsi Legislasi

- Prakarsa pembuatan undang-undang
- Pembahasan rancangan undang-undang
- Persetujuan atas pengesahan rancanagn undang-undang

-Fungsi Pengawasan

- Pengawasan terhadap penentu kebijakan
- Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
- Pengawasan terhadap anggaran beli belanja Negara

-Fungsi Anggaran

- Penentu dan pelaksanaan anggaran Negara.

Kekuasaan Yudikatif

Fungsi dari yudikatif adalah lemabag Negara yang tugas utamanya sebagai pengawal,pengawas,dan pemantau proses berjalannya UUD 1946